

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian SPPFBT dalam program PTSL dan bentuk perlindungan hukum bagi pemohon sertifikat berdasarkan SPPFBT dalam program PTSL. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan substansi alas hak sebagai dasar proses pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 *juncto* PP No. 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 yang alas hak sebagai syarat pendaftaran tanah untuk program PTSL dapat dipangkas dengan melengkapi SPPFBT yang di dalam pembuatannya tanpa melalui proses penetapan hak keperdataannya oleh pejabat yang berwenang tujuannya karena pembuatan SPPFBT sebagai pengganti alas hak lebih mudah dilaksanakan. Kemudahan dalam proses pembuatan SPPFBT yang tidak memperhatikan kaidah hukum dan cara perolehan hak dapat menyebabkan perkara sengketa dikemudian hari karena masih belum memiliki kekuatan hukum yang bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum karena surat pernyataan tersebut hanya dibuat berdasarkan pernyataan sepihak, namun jika PTSL melalui surat pernyataan tersebut sudah menerbitkan sertifikat maka dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat karena sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pendaftaran tanah sistematis lengkap, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT).

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal force of proving SPPFBT in the PTSL program and forms of legal protection for certificate applicants based on SPPFBT in the PTSL program. The type of research used in this study is normative juridical research using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The results of the study show differences in the substance of rights as the basis for the land registration process according to Government Regulation No. 24 of 1997 juncto to Government Regulation No. 18 of 2021 and Permen ATR/Head of BPN No.6 of 2018 which states that the basis of rights as a condition for land registration for PTSL can be trimmed by completing the SPPFBT which is in its manufacture without going through the process of determining its civil rights by the authorized official. easier to implement. Ease in the process of making SPPFBT that does not pay attention to legal principles and methods of obtaining rights can lead to disputes in the future because it still does not have legal force that can provide legal certainty and legal protection because the statement letter is only made based on a unilateral statement, but if PTSL through a statement letter If the certificate has been issued, it can provide legal protection to the owner of the certificate because the certificate can be used as evidence in court.

Keywords: *Legal protection, complete systematic land registration, statement of physical ownership of land parcels (SPPFBT).*

